



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 15971

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 14.883.014.344**

1. Tanah Seluas 1.218 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI  
Rp. 70.499.362
2. Tanah Seluas 6.440 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI  
Rp. 109.696.545
3. Tanah Seluas 3.730 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 30.513.451
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 23.373.000
5. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 26.177.760
6. Tanah Seluas 1.925 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 80.029.837
7. Tanah dan Bangunan Seluas 8.095 m2/800 m2 di KAB / KOTA  
PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 7.204.661.918
8. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/400 m2 di KAB / KOTA  
PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.579.818.802
9. Tanah Seluas 38.900 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 767.648.700
10. Tanah Seluas 2.445 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 99.953.311
11. Tanah Seluas 3.430 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL



SENDIRI Rp. 140.220.801

12. Tanah Seluas 11.966 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 190.236.066

13. Tanah dan Bangunan Seluas 982 m2/200 m2 di KAB / KOTA  
PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.197.002

14. Tanah Seluas 1.305 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 227.115.000

15. Tanah Seluas 10.400 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 885.748.500

16. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 18.874.800

17. Tanah Seluas 2.131 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 87.116.771

18. Tanah Seluas 2.568 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 104.981.637

19. Tanah Seluas 3.445 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 140.834.011

20. Tanah Seluas 3.553 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 105.910.820

21. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/415 m2 di KAB / KOTA  
PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 289.406.250

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp.**

**332.865.225**

1. MOBIL, DAIHATSU ZEBRA MINI BUS Tahun 1988, HASIL  
SENDIRI Rp. 12.127.500

2. MOBIL, DAIHATSU FEROZA JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI  
Rp. 33.813.450

3. MOBIL, DAIHATSU TARUNA MINI BUS Tahun 1999, HASIL  
SENDIRI Rp. 49.985.100

4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINI BUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI  
Rp. 38.223.900

5. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI  
Rp. 144.319.725

6. MOBIL, SUZUKI KARIMUN JEEP Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.  
50.965.200

7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.430.350



## C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 263.540.000

## D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

## E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.817.776.999

## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

## Sub Total

Rp. 17.297.196.568

## III. HUTANG

Rp. ----

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 17.297.196.568

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.